

**PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI,
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**Julianti LB. Mossy & Abdul Latif L. Arsyad¹**ABSTRACT**

Developing countries are faced with conditions of development inequality and injustice. Developed economics not only requires an appropriate, efficient and equitable way, but there must also be a recipe for changing inequality evenly. It must be admitted that economic growth also contributed a lot in creating economic miracles. The power of economic growth to transform society from poverty to prosperity is a reason.

Therefore, an intelligent instrument is needed to overcome the problems of inequality and injustice faced. Islamic economics is present as an instrument of solution. Not an alternative, as discussed. Economic growth jika studied in Islamic economics is the optimal growth, in terms of both material and spiritual prosperity. Islamic economics does not allow consumption of capital and growth that exceeds limits which imposes unnatural sacrifices on humans. So according to Sharia Economy a low growth rate accompanied by an even distribution of income would be better than a high growth rate but not accompanied by an equitable distribution.

Keyword: Growth, Equity, Sharia Economy

ABSTRAK

Negara berkembang diperhadapkan dengan kondisi ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan. Ekonomi yang dikembangkan tidak hanya membutuhkan cara yang tepat, efisien dan berkeadilan, tapi juga harus ada resep untuk mengubah ketidakmerataan menjadi merata. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi juga banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi. Kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk mentransformasi masyarakat dari kemiskinan menuju kemakmuran menjadi suatu alasan.

Olehnya itu dibutuhkan suatu instrumen cerdas guna mengatasi masalah ketidakmerataan dan ketidakadilan yang dihadapi. Ekonomi syariah hadir sebagai instrumen solusi. Bukan alternatif, sebagaimana diwacanakan. Pertumbuhan ekonomi menurut Islam adalah pertumbuhan yang optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani. Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata.

Keyword : Pertumbuhan, Pemerataan, Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Dalam Ekonomi Pembangunan, kajian mengenai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menempati posisi yang cukup penting di kalangan para ekonom. Kajian ini setidaknya dimulai ketika ekonom mengamati fenomena-fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan ini. Perkembangan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : *pertama*, kemakmuran atau taraf hidup yang semakin

¹ Mahasiswa Tingkat Akhir Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

meningkat yang dicapai oleh masyarakat dunia, *kedua*, terciptanya kesempatan kerja baru kepada penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.

Ekonomi pembangunan pada dasarnya telah melewati tiga fase yang berbeda.² Fase *pertama*, adalah Ekonomi Pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan slogannya yang terkenal *laissez faire*. Fase ini bertahan lebih kurang satu abad sejak publikasi *The Wealth of Nation*, karya Adam Smith tahun 1776.³ Fase *kedua*, dimulai setelah perang dunia kedua dan ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena banyak negara-negara yang baru merdeka, maka analisis masalah yang berkenaan dengan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian.⁴ Pada fase ini fokus perhatian berpindah dari ekonomi liberalisme klasik kepada Neo Klasik. Strategi yang dipegang adalah ketergantungan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintah dalam perekonomian. Kapitalisme *laissez faire* telah kehilangan peran ketika itu, akibat peristiwa Great Depression (1929-1932).⁵ Ekonom yang sangat berperan dalam fase ini adalah John Maynard Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan tahun 1936.⁶ Pada fase inilah ekonomi Keynesys dan sosialis memperoleh momentum di dunia Barat. Sedangkan fase *ketiga* memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Dalam fase ketiga ini perhatian Ekonomi Pembangunan cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali pro kepada kebebasan pasar. Fase ini terjadi mulai tahun 1970-an, yaitu ketika pelaksanaan strategi Keynes dan sosialis mulai melemah. Pada fase ini ekonomi neoklasik mulai "comeback" dan menjadi paradigma yang dominan. Mereka berkeyakinan bahwa liberalisasi pasar dengan pengurangan peran pemerintah dalam bidang ekonomi adalah sangat penting untuk menyelesaikan masalah

² M.Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, (USA: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992), h. 15

³ Michael P.Todaro, *Economic Development in The Third World*, (New York: London, Longman 1989), p.7

⁴ E.E.Hegen, *On The Theory of Social Change*, (1992), 36. lihat juga H.W.Arndt, *Development Economic Before 1945, 1972*), h. 13-29.

⁵ *Great Depression* (Depresi besar) merupakan priode kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Puncak kemerosotan tersebut ditandai oleh meningkatnya angka pengangguran. Saat itu ¼ tenaga kerja Amerika Serikat tidak memiliki pekerjaan (*unemployment*). Kemerosotan yang sangat tajam juga dialami oleh Pendapatan Nasional Amerika Serikat. Kemunduran ekonomi yang serius itu merebak ke seluruh dunia, baik ke negara-negara industri maupun negara-negara miskin. Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), h. 413-414.

⁶ Keynes adalah ekonom terkemuka dari Universitas Cambridge. Ia dianggap sebagai ekonom yang mampu melahirkan pikiran-pikiran baru yang tidak dicetuskan oleh pendahulunya. Saat itu ada dua permasalahan yang muncul setelah depresi yang dialami oleh Amerika Serikat, yaitu teori tentang uang dan apa yang harus diusahakan oleh negara untuk mengurangi pengangguran. Keynes dianggap memiliki ulasan teoritis yang paling sistimatis dan komprehensif. (Lijjat George Soule, *Idea of the Great Economist*, terj, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Jakarta: Kanisius, 1994), h. 112.

negara berkembang. Fase ini juga dianggap sebagai era kebangkitan liberalisme dan ekonomi neoklasik.⁷

Ketiga fase tersebut, menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program pembangunan di negara-negara berkembang,⁸ khususnya di negara-negara muslim. Inkonsisten tersebut melahirkan analisis dan resep kebijakan yang bertentangan dan ini sangat membahayakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang yang hendak melaksanakan pembangunan dengan model Barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep antara neo klasik ala Keynes dengan liberalisme klasik (ekonomi pasar yang mereduksi peran negara dalam ekonomi) yang diajarkan Adam Smith. Kebingungan negara-negara berkembang itu juga dipengaruhi oleh konsep-konsep pembangunan dari negara-negara yang menerapkan sistem sosialis.

Karena itu, maka tugas yang dihadapi negara berkembang sangat rumit. Mereka tidak hanya harus mengembangkan ekonomi dengan cara yang tepat dengan tingkat efisien dan keadilan yang tinggi dalam penggunaan sumberdaya, tetapi juga harus mengubah ketidakmerataan pembangunan yang ditimbulkan oleh resep yang salah itu menjadi merata.

Walau demikian, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang telah berlangsung beberapa waktu lalu dan sampai saat ini berlangsung, juga banyak memberikan kontribusi dalam menciptakan keajaiban-keajaiban ekonomi. Kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk mentransformasi masyarakat dari kemiskinan menuju kemakmuran menjadi suatu alasan.

Pernyataan di atas, tidak harus menggembirakan kita. Justru kita harus memberikan perhatian terhadap kenyataan-kenyataan tragis yang ditemukan. Memang bisa saja dikemukakan argumen bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan semakin meningkatnya pertumbuhan, kekurangan-kekurangan itu akan bisa dihilangkan. Akan tetapi hal demikian tidak sesuai fakta lapangan, sebab kalau memang demikian, maka negara-negara industri pasti akan terbebas dari masalah-masalah seperti itu. Pada kenyataannya dewasa ini lebih dari 100 juta orang di negara-negara industri hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari lima juta orang menjadi tunawisma.⁹

Perekonomian global masih terus mengalami ketidakpastian, bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS), risiko keamanan dan geopolitik, ketegangan di Timur

⁷ M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Thought, (IIIT), USA, 1992. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Edisi Indonesia, (Jakarta: Risalah Gusti, 1999), h. 160

⁸ Negara berkembang memiliki karakteristik antara lain, taraf hidup yang rendah, produktifitas yang rendah, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ketergantungan pada ekspor hasil-hasil pertanian (lihat, Ace Pce Pertadireja, *Pengantar Ekonomika*, (Yogyakarta : BPFE, 1984), h. 213-219.

⁹ Anwar Ibrahim, *The Asia Renaissance*, terj Ihsan Ali fauzi, Renaisans Asia, (Bandung, Mizan, 1998), h. 80-81

Tengah, Turki, dan Korea Utara, dampak Brexit, serta moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang mempengaruhi kinerja perdagangan internasional.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah Indonesia terus berupaya melaksanakan program pembangunan dan Nawa Cita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia. Tingkat inflasi mencapai 3,02%, menurun dibandingkan tingkat inflasi di 2015 sebesar 3,35%. Angka inflasi ini merupakan inflasi tahunan terendah sejak 2010. Tingkat pengangguran mencapai 5,6%, menurun dibandingkan 2015 sebesar 6,2%. Tingkat kemiskinan mencapai 10,7%, menurun dibandingkan 2015 sebesar 11,2%. Nilai tukar rupiah atas dolar AS di 2016 menguat pada kisaran Rp13.307/US\$ di tengah kecenderungan penguatan dolar AS. karena keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Amerika Serikat.¹⁰

Dalam mengelola perekonomian dihadapkan pada situasi global yang dinamis dan aspirasi masyarakat yang terus meningkat, pemerintah menggunakan seluruh instrumen kebijakan agar kinerja perekonomian terus membaik dan fundamental ekonomi nasional dapat diperkuat. Kebijakan fiskal melalui APBN merupakan instrumen pengelolaan ekonomi yang sangat penting melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi. Paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memerangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan.

Sementara laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.¹¹

Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

¹⁰ <http://www//detik.com/detik.financial>. Terbitan 5 Pebruari 2018

¹¹ Badan Pusat Statistik, 2020.

Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

BPS mencatat tujuh faktor sebagai pendorong utama penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Faktor pertama yang mendorong turunnya kemiskinan di Indonesia ialah naiknya rata-rata upah riil buruh per hari. Rata-rata upah riil buruh tani per hari pada Maret 2019 naik 0,93 persen dibanding September 2018. Sementara rata-rata upah riil buruh bangunan per hari pada Maret 2019 naik 0,76 persen dibanding September 2018. Selain itu, faktor lainnya yang mendorong turunnya kemiskinan adalah indeks nilai tukar petani yang selalu berada di atas 100. Nilai tukar petani ini menunjukkan nilai tukar antara pendapatan rumah tangga pertanian dan konsumsi. Nilai tukar petani pada Januari 2019 sebesar 103,33, Februari sebesar 102,94, dan Maret 102,73. Faktor ketiga penyebab turunnya kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka pada Februari yang sebesar 5,01 persen turun 0,33 persen dari Agustus 2018 dan 0,12 persen dari Februari 2018. Faktor keempat adalah inflasi umum yang cukup rendah selama periode September 2018-Maret 2019 sebesar 1,52 persen. Selanjutnya, adanya penurunan harga eceran beberapa komoditas pada periode September 2018-Maret 2019 juga menjadi faktor pendorong turunnya kemiskinan di Indonesia. Pada periode tersebut, harga daging ayam ras turun 1,85 persen, minyak goreng turun 2,12 persen, gula pasir turun 1,22 persen, cabai rawit turun 11,21 persen, dan cabai merah turun 10,35 persen. Lebih lanjut, faktor keenam pendorong turunnya kemiskinan adalah pelaksanaan program beras sejahtera (Rastr) sudah sesuai jadwal. Menurut data Perum Bulog, realisasi distribusi program Rastra pada Januari sebesar 99,47 persen, Februari 98,8 persen, dan Maret 98,5 persen. Terdapat peningkatan cakupan penerimaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang terealisasi pada triwulan I 2019 yang mencapai 219 kabupaten/kota, bertambah 61 kabupaten/kota dibanding triwulan III 2018. Faktor ketujuh pendorong berkurangnya kemiskinan adalah rata-rata pengeluaran per kapita pada Desil atau kelompok 1 mengalami peningkatan. Menurut desil pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata pengeluaran per kapita pada kelompok penduduk Desil/kelompok 1 periode September 2018-Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar

4,32 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan pada periode tersebut yang sebesar 3,55 persen.¹²

Namun angka ini tetap belum menggambarkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jurang pemisah antara Barat dan Timur masih terlihat nyata. Memang, Indonesia termasuk negara berkembang yang menikmati pertumbuhan ekonomi positif sejak tiga tahun terakhir.

Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15 833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4 174,9. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,78 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,97 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen. Sementara struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.¹³ Itu artinya masih ada ketidakmerataan dan ketidakadilan pembangunan ekonomi Indonesia, dimana posisi wilayah timur Indonesia selalu berada pada garis pertumbuhan paling bawah.

Meski perekonomian Indonesia 2019 mengalami perlambatan, produk domestik bruto (PDB) per kapita justru Indonesia mengalami peningkatan. Pada 2019, PDB per kapita Indonesia mencapai Rp 59,1 juta atau setara dengan US\$ 4.174,9. Angka ini meningkat 5,5% dibandingkan

¹² Badan Pusat Statistik, 2020. Lihat juga, <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/7-faktor-pendorong-turunnya-kemiskinan-di-indonesia-versi-bps/1531931>

¹³ Badan Pusat Statistik 2020, “*Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen*”. Lihat, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>

dengan 2018 yang sebesar Rp 56 juta dan 2017 yang sebesar Rp 51,89 juta.¹⁴ Bila dihitung kasar, rata-rata pendapatan orang Indonesia adalah Rp4 juta per bulan. Sepintas data ini menampilkan seolah-olah semua orang Indonesia hidup berkecukupan dengan pendapatan Rp4 juta per bulan. Namun jika ditelusuri secara lebih detil, fakta di lapangan berbanding terbalik. Masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar.

Disisi lain, rasio gini¹⁵ Indonesia sebagaimana dikeluarkan Badan Pusat Statistik juga menunjukkan perbandingan yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan rasio gini Maret 2019 yang sebesar 0,382 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan rasio gini September 2018 yang sebesar 0,384. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, rasio gini di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,391. Angka ini jauh dari angka 1, namun rasio gini tersebut cukup memberikan isyarat bahwa ada kesenjangan. Ketimpangan ekonomi Indonesia merupakan yang ke-empat di dunia, dimana 49,3 persen ekonomi nasional dikuasi oleh satu persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Fakta lain tentang kesenjangan atau ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Indonesia ditunjukkan dengan struktur perekonomian yang tak seimbang antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.¹⁶

Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini bertolak belakang dengan asumsi-asumsi *ceteris paribus*. Dalam konteks ini, menurut Keynes, “Kita terkungkung dan kehabisan energi dalam perangkap teori dan implementasi ilmu ekonomi kapitalis yang ternyata tetap saja mandul untuk melakukan terobosan mendasar guna mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup umat manusia di muka bumi ini”¹⁷.

Kesimpulannya, konsep dan kebijakan ekonomi yang berdasarkan kapitalisme dan sosialisme, terbukti telah gagal mewujudkan perekonomian yang berkeadilan.¹⁸ Akibat berpegang paham kapitalis dan sosialis, maka terjadi ketidakseimbangan makroekonomi dan instabilitas nasional.

¹⁴ Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan_pendapatan_per_kapita_Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018.

¹⁵ Rasio Gini merupakan alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Kamus Ekonomi.financial.bisnis.com.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, 2018

¹⁷ M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge, Ibid*. Lihat juga, Fernando Cardim de Carvalho, “Keynes and the reform of the capitalist social order”. *Journal of Post Keynesian Economics/Winter*, Vol. 31, No. 2, (2008), h. 194. Keynes percaya bahwa, Kapitalisme dapat dihilangkan, dengan menunjukkan output yang dapat disimpan secara permanen di level yang lebih tinggi dari apa diketahui kemudian, memperbaiki kondisi kehidupan semua orang atau memungkinkan meningkatnya pendapatan untuk kelompok sosial tertentu tanpa harus mengurangi pendapatan nyata grup lain. Bahkan, dia yakin ekonomi bisa mempertahankan kondisi booming, mendorong investasi ke titik di mana kelangkaan modal bisa hilang dan, secara teknis, kapitalisme seperti itu dapat dibuang

¹⁸ *Ibid*

Dengan melihat realita di atas, jelas ada *"something wrong"* dalam konsep-konsep yang selama ini diterapkan di berbagai negara, karena kelihatan masih jauh dari yang diharapkan. Konsep-konsep tersebut terlihat tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan, bahkan bagi negara-negara pencetus konsep tersebut. Ini terbukti dari ketidakmampuan direalisasikan sasaran-sasaran yang diinginkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan distribusi pendapatan dan kekayaan merata.¹⁹

Sistem kapitalis dan sosialis ekonomi selama ini jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya lebih bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan yang tinggi (*high cost econom*)²⁰.

Ilmu Ekonomi Pembangunan sekarang ini menghadapi masa krisis dan *re-evaluasi*. Ia menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Banyak ekonom dan perencana pembangunan yang skeptis tentang pendekatan utuh ilmu ekonomi pembangunan kontemporer. Menurut Kursyid Ahmad, sebagian mereka berpendapat bahwa teori yang didapat dari pengalaman pembangunan Barat kemudian diterapkan di negara-negara berkembang, jelas tidak sesuai dan merusak masa depan pembangunan itu sendiri.²¹

Pada akhirnya, kita memerlukan suatu konsep pembangunan ekonomi yang tidak hanya mampu merealisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam suatu pembangunan ekonomi secara tepat, teruji dan bisa diterapkan oleh semua negara-negara di belahan bumi ini, tetapi juga yang terpenting adalah kemampuan konsep tersebut meminimalisir atau bahkan menghilangkan segala *negative effect* pembangunan yang dilakukan. Konsep tersebut juga harus mampu memperhatikan sisi kemanusiaan, keadilan dan pemerataan tanpa melupakan aspek moral.

¹⁹ Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami*, Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf, Dar An-Nafais, (Kuwait, 1999), h. 276.

²⁰ Ekonomi biaya tinggi adalah proses ekonomi di suatu daerah atau negara yang memerlukan atau mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dari seharusnya akibat adanya pemberlakuan tarif yang lebih tinggi ataupun pungutan-pungutan liar yang seharusnya tidak ada serta sebagai akibat 'budaya korupsi'. Akibat adanya ekonomi biaya tinggi, maka pada akhirnya ekonomi biaya tinggi tersebut akan dikompensasikan terhadap harga jual barang yang terlibat dalam proses ekonomi tersebut, baik produk yang akan diekspor maupun untuk produk-produk yang berbahan mentah impor maupun lokal, akibatnya output harga produknya menjadi kurang kompetitif dipasaran lokal yang sudah dibanjiri produk impor apalagi jika harus bersaing dipasar internasional. Dapatlah disadari bahwa ekonomi biaya tinggi menyebabkan suatu daerah tidak mampu bersaing dengan daerah lain dalam pembangunan ekonominya. Lihat, Abu Kosim dan Taufiq, "*Ekonomi Biaya Tinggi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume. 7, No. 2, (Desember 2009), h. 55. Lihat juga, (<http://www.freelists.org>).

²¹ Umar Capra, *ibid*, h. 25

Kesadaran akan pentingnya nilai moral dalam ekonomi pembangunan telah banyak dikumandangkan oleh para ilmuwan ekonomi. Fritjop Capra dalam bukunya, *"The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture"*, menyatakan, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai dan paling normatif di antara ilmu-ilmu lainnya. Model dan teorinya akan selalu didasarkan atas nilai tertentu dan pada pandangan tentang hakekat manusia tertentu, pada seperangkat asumsi yang oleh E. F Schummacher disebut "meta ekonomi" karena hampir tidak pernah dimasukkan secara eksplisit di dalam ekonomi kontemporer.²²

Demikian pula Ervin Laszlo dalam bukunya *3rd Millenium, The Challenge and the Vision* mengungkapkan kekeliruan sejumlah premis ilmu ekonomi, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan sama sekali nilai-nilai dan moralitas.²³ Menurut mereka kelemahan dan kekeliruan itulah yang antara lain menyebabkan ilmu ekonomi tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. yang terjadi justru sebaliknya, yaitu ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara berkembang (yang miskin) dengan negara-negara dan masyarakat kaya. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan tidak ada jalan lain kecuali dengan merubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban.

Produksi harus diprioritaskan dari konsumsi, pengeluaran defisit dan hutang nasional yang terlalu besar merupakan hal yang membahayakan bagi masyarakat. Kebijakan yang memacu konsumsi ketimbang tabungan dan menggalakkan hutang merupakan hal yang bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan standar hidup masyarakat.

Perencanaan pembangunan ekonomi secara terpusat (*Centrak Planning*) dan totalitarianisme terbukti tidak bisa berfungsi Diperlukan suatu sistem finansial baru untuk menciptakan kerangka kerja finansial yang tanggung dalam meminimalisir inflasi dan ketidakpastian. Harus ada kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan kesejahteraan dengan memberikan kebebasan terjadinya pergerakan modal (*capital movement*) uang dan orang dari satu tempat ke tempat lain.²⁴

Lebih lanjut Mark Skousen, yang terkenal dengan kritik-kritiknya terhadap konsep ekonomi, baik secara mikro maupun makro, menyatakan bahwa ekonomi baru (*new economy*) pasti akan terwujud. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa negara manapun di dunia ini, baik miskin atau kaya, tidak boleh melupakan prinsip-prinsip di atas.²⁵

²² Kursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, dalam Etika Ekonomi Politik, (Risalah Gusti, Jakarta, 1977). h. 9

²³ Fritjop Capra, *Titik balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Budaya*, ter. The Turning Point, Science, Society, The Rising Culture, (Yogyakarta: Yayasan Betang Budaya, 1999, cet,3), h. 246

²⁴ Ervin Laszlo, *Millenium Ketiga, Tantangan dan Visi* (terj. 3rd Millenium The Challenge and Vision, (Jakarta, Dinastindo, Adiperkasa Internasional, 1999), h. 34

²⁵ Mark Skousen, *Economics on Trials : Lies, Myths, and Realities*, (USA Bussiness One Irwin, 1991),

Negara yang mengabaikannya dipastikan akan terus mengalami kegagalan dan menghadapi berbagai masalah, seperti inflasi, deflasi secara tiba-tiba, budget yang tidak seimbang, krisis ekonomi birokrasi yang menakutkan, stagnasi ekonomi, pencemaran lingkungan, perang, dan sebagainya. Sebaliknya, negara yang memperhatikan prinsip-prinsip itu akan mengalami penguatan di berbagai sektor seperti kuatnya nilai mata uang, suku bunga yang rendah, pasar modal yang kuat dan sebagainya.²⁶

Kondisi ini mengharuskan pembangunan ekonomi harus dilihat dalam konteks pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerataan pendapatan ataupun kesejahteraan itulah yang selama ini masih belum bisa dicapai oleh pemerintahan di beberapa negara yang penduduknya menganut mayoritas beragama Islam termasuk Indonesia. Kita juga bisa melihat jurang yang lebar antara masyarakat di wilayah Barat dan wilayah Timur. Sampai kemudian pemerintah Indonesia saat ini, tengah berusaha membangun wilayah Timur dari ketertinggalan pembangunan. Pemerataan pembangunan memang perlu terus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan sejahtera.

Analisis Kuznets mengenai hubungan pertumbuhan dengan ketidakmerataan ikut mendukung kondisi di atas. Menurut Kuznets dalam masa pertumbuhan akan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor primer yang produktivitasnya rendah ke sektor industri dan jasa dengan produktivitasnya tinggi. Perbedaan tingkat produktivitas dari kedua sektor ini menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan yang terjadi pada awalnya melebar, kemudian pada masa pertumbuhan akan kembali menyempit.

Dalam artikelnya yang berjudul *"Inequality and Growth Reconsidered: Lesson from East Asia"*, Birdsall et, al., (1995) menolak pandangan kedua teori ketidakmerataan diatas. Justru dengan pemerataan, pertumbuhan yang dicapai bisa lebih tinggi. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan model regresi terhadap delapan negara di Asia Timur (Hongaria, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan/China dan Thailand). Meskipun selama tiga dasa warsa pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut tinggi, pemerataan pendapatan menjadi semakin baik atau minimal tetap.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan yang tidak seimbang juga mendapat perhatian para ekonom Islam, seperti Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111). Demikian juga kaum merkantilis, kaum klasik sampai ke Adam Smith (1737-1790), Marx (1818-1883). Sebutan atau istilah pertumbuhan, perkembangan

h. 292

²⁶ Ibid.

dan pembangunan ekonomi sering digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai maksud yang sama, terutama pembicaraan mengenai masalah ekonomi.

Mayoritas penulis muslim yakin bahwa nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada generasi muslim melalui pendidikan memiliki peran dominan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Orang pertama yang mengisyaratkan hal ini secara ilmiah dan sistematis adalah Malik bin Nabi dalam karyanya "*al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisodi*".²⁷ Dalam karyanya ini Malik bin Nabi menekankan peranan manusia dalam masyarakat muslim sebagai batu fondasi pertama bagi proses pembangunan ekonomi. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat sejumlah penulis kontemporer.

Menurut Abu Yusuf, Islam sarat dengan nilai-nilai yang relevan dengan pembangunan. Nilai-nilai tersebut antara lain tercermin dalam anjuran disiplin waktu, memelihara harta, nilai kerja dan perintah untuk selalu berjamaah, meningkatkan produksi, menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan.²⁸

Islam melihat pembangunan ekonomi tidak sebatas membangun faktor-faktor produksi, tapi dalam pengertian yang luas, menyeluruh dan substantif dengan menekankan pembangunan insan atau manusia seutuhnya (*human development*). Puncaknya adalah kehidupan yang seindah-indahnya (*fi ahsani taqwiim*). Ada nilai menuju keadaan yang sesuai dengan hakikat atau jati diri fitrah manusia. Pembangunan dalam Islam adalah menempati peringkat jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut sebagai *tazkiyat an nafs*.²⁹ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. 91 ayat 9-10. "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya".³⁰

Dari paparan pendahuluan tersebut, yang menjadi sorotan penulis dalam pengkajian tulisan ini adalah bagaimana konsep pertumbuhan dan pemerataan menurut ekonomi syariah yang dapat menjadi solusi bagi terciptanya keadilan ekonomi masyarakat.

B. Makna Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern adalah perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat.³¹ Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi

²⁷ Malik bin Nabi, *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtisod* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1974), h. 255.

²⁸ Ibrahim Yusuf, *Istiratijiyatu wa Teknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam* (Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981), h. 269.

²⁹ M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 63.

³⁰ Lihat Q.S. 91 (9-10)

³¹ Sadono Sukirno, *op.cit.*, h. 413-414.

fiskal yang terjadi di suatu negara seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya.

Kondisi ini membuat para ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional risil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampuradukkan penggunaan kedua istilah tersebut. Mencampuradukan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Baik perkembangan dari segi investasi, pengeluaran pemerintah, konsumsi maupun ekspor impor. Hal ini juga didasarkan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang selama ini dipakai secara teori melalui *Gross National Product* (GNP). GNP didefinisikan sebagai jumlah nilai akhir dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun. GNP ini mengukur aliran penghasilan negara (dari pertumbuhan ekonomi) selama kurun waktu tertentu. Berikut formulanya.

$$\text{GNP} = C + I + G (E - M) + Z^{32}$$

Di mana:

C = *Consumer Spending*

I = *Investement Spending*

G = *Output for Government*

$(E-M)$ = *Net Export or Import*

Z = *Zakat*

Dalam ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.³³ Pertumbuhan ekonomi didefenisikan dengan *a suistained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*.³⁴ (Pertumbuhan terus-

³² Tambahan huruf Z (Zakat) merupakan konsep ekonomi Islam dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, dimana hal tersebut tidak terdapat dalam konsep ekonomi konvensional, dan tidak dimasukkan dalam pengukuran ini, karena yang diambil adalah dari pengukuran pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1987, tapi bisa dimasukkan dalam negara yang memakai sistem ekonomi Islam dalam pelaksanaan ekonominya.

³³ Sadono Sukirno, *op.cit.* h. 415

³⁴ Hal ini bisa dilihat dalam pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim klasik, seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, At-Tusi, Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim. Penjelasan tentang pemikiran ekonomi para ulama tersebut lihat, Abul Hasan M.Sadeq dan Aidit Ghazali, *Readings in Islamic Economic Thought*, (Malaysia, Loqman Malaysia, 1992).

menerus dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).

Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life*³⁵ (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan).

Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Sumberdaya yang dapat dikelola (*investible resources*)
2. Sumberdaya manusia (*human resources*)
3. Wirausaha (*entrepreneurship*)
4. Teknologi (*technology*)³⁶

Islam juga melihat bahwa faktor-faktor di atas juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

1. **SDM yang dapat dikelola (*investable resources*)**

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumberdaya yang dapat digunakan dalam memproduksi asset-asset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman industri, mesin, dsb. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumberdaya, merubah sumberdaya tersebut dalam bentuk asset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua yaitu sumber domestik/internal serta sumber eksternal.

Negara-negara muslim harus mengembangkan kerjasama ekonomi dan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak tergantung kepada sumber eksternal. Hal ini bertujuan

³⁵ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, (Malaysia, International Islamic University Press, 1987), h. 55

³⁶ Munawar Iqbal, *Financing Economic Development*, Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, (Malaysia, International Islamic University Press, 1987), h. 102

untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat.³⁷ Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan sumberdaya domestik seperti tabungan dan simpanan sukarela, pajak ataupun usaha lain berupa pemindahan sumberdaya dari orang kaya kepada orang miskin.

2. SDM (*human resources*)

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah sumberdaya manusia. Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumberdaya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas profesional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional.

3. Wirausaha (*entrepreneurship*)

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, "Hendaklah kamu berdagang (berbisnis), karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki". Dalam hadits yang lain beliau bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)".³⁸

Dengan demikian, semangat *entrepreneurship* dan kewiraswastaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Muhammad Yunus telah menekankan pentingnya pembangunan jiwa wirausaha dalam pembangunan ekonomi di negara-negara muslim yang tergolong miskin. Dalam hal ini ia mengatakan, : "Upah buruh bukanlah satu jalan mulus bagi pengurangan kemiskinan, justru wirausahalah yang mempunyai potensi lebih besar dalam meningkatkan basis-basis asset individual daripada yang dimiliki oleh upah kerja".³⁹

³⁷ Abul hasan Muhammad Sadeq, *op.cit.*, h. 56

³⁸ Beban hutang merupakan permasalahan dunia yang saat ini sangat sulit dicari jalan keluarnya. Beban ini sangat terasa khususnya bagi negara-negara berkembang. Solusi yang diberikan selama ini terkesan tamal sulam. Biasanya pemecahannya berupa pemberian tambahan pinjaman baru yang menyebabkan jumlah hutang yang ditanggung negara pengutang semakin membengkak. Padahal jumlah angsuran utang pokok dan bunga yang diteima oleh bank dunia sudah melebihi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia kepada negara dunia ketiga secara menyeluruh (Lihat Sumitro Djoyohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Obor Indonesia, 1991), h. 384.

³⁹ M.Umer Chapra, *Islam and Economic*, *op.cit.*, h. 136

Menumbuhkan kembangkan jiwa kewisahausahaan akan mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga kerja yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi yang dilakukan di sejumlah negara oleh Michigan State University dan para sarjana, telah menunjukkan secara jelas kontribusi yang besar dan industri kecil dan usaha mikro dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja bahkan secara tidak langsung mereka berarti mengembangkan pendapatan dan permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku dan ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang memerlukan bantuan dana luar (asing), bahkan kadang tidak begitu tergantung kepada kredit pemerintah dibanding industri berskala besar.

Karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini muncul kesadaran yang meluas bahwa strategi industrialisasi modern yang berskala besar pada dekade terdahulu secara umum telah gagal memecahkan masalah-masalah keterbelakangan global dan kemiskinan⁴⁰. Litte, Scietovsky dan Scott telah menyimpulkan bahwa industri-industri modern yang berkla besar biasanya kurang dapat menghasilkan keuntungan daripada industri-industri kecil, di samping itu industri besar lebih mahal dalam hal modal dan lebih sedikit menciptakan lapangan pekerjaan⁴¹. Karena itulah Usaha Mikro (Industri kecil) secara luas dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta, baik untuk tujuan-tujuan pertumbuhan maupun pemerataan bagi negara-negara berkembang.⁴² Banyak para sarjana meragukan kontribusi industri-industri besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dibanding industri kecil dan usaha mikro.⁴³

Karena itulah Hasan Al-Banna memberikan dan mengembangkan industri rumah tangga yang utama dalam pembahasan tentang reformasi ekonominya sesuai dengan jaran Islam. Hal itu beliau tekankan karena akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat miskin, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.⁴⁴

⁴⁰ Muhammad Yunus, *The Poor as the Engine of Development*, dalam *Economic Impact*, 2 (1988), h. 31

⁴¹ Carl Lidholm dan Donald Mead, *Small Scale Enterprise : A Profile*, diproduksi kembali dari *Small Scale Industries in Developing Countries : Empirical Evidence and Policy Implication*, (Michigan State: University Development Paper, 2, 1998), h. 12.

⁴² Ian Litte, Tibor Scietovsky dan Maurice Scott, *Industri and Trade in Some Developing Countries* (London: Oxford University Press, 1970), h. 91

⁴³ Baru-baru ini sejumlah buku telah diterbitkan untuk menunjukkan kekuatan industri kecil. Lihat Graham Gudgin, *Industrial Location Process and Employment Growth* (London : Gower, 19978, dan lihat pula David Birch, *The Job Generation, Process* (Cambridge, Mass : MIT Program on Neighbourhood and Regional Change, 1979).

⁴⁴ Hasan Al-Banna, *Majmu'at at-Rasail*, (Alexandaria, Darud Dakwah, 1989), h. 267.

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

4. Teknologi

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Dinamika dan diskontinuitas tersebut berkaitan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi (research and development) yang menghasilkan perubahan teknologi. Dalam Al-quran juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia.⁴⁵ Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumberdaya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia.

C. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Dari Sudut Islam

Keseimbangan orientasi duniawiyah dan ukhrawiyah merupakan orientasi yang diidamkan, khususnya dalam Islam. Berangkat dari orientasi yang seimbang antara duniawiyah (materi) dan ukhrawiyah (kepuasan non-materi) itulah Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan satu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Karena, menurut Islam, keadilan sosial adalah salah satu unsur penting dari dinamika sosial. Dalam konteks suatu perekonomian yang sedang tumbuh inilah kue pendapatan nasional dapat diperbesar demi kemungkinan masing-masing menerima secara adil dari pertumbuhan tersebut.

Islam tidak menyukai perbedaan kekayaan dalam masyarakat melebihi titik tertentu. Sebab, pada gilirannya ini akan menimbulkan kebencian dan permusuhan yang membawa pada suatu konflik keras diantara berbagai bagian masyarakat yang pada akhirnya menghancurkan fondasinya. Ketika ketidak merataan ekonomi berubah menjadi kecenderungan yang tidak wajar dan orang-orang miskin menjadi budak yang tidak berdaya ditangan orang-orang kaya, maka itu tanda-tanda kehancuran bagi orang-orang itu.

Islam bagaimanapun juga tidak akan membolehkan situasi semacam itu terus berkembang. Karena itu, islam menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah ketidak merataan

⁴⁵ Ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk melakukan eksplorasi di bumi misalnya surat 16:14, 30:46, 35:12, 45:12, 36:33-35. Penjelasan tentang ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi, Lihat Muhammad M.Akram Khan, *Economic Message of Quran*, (Kuwait: Islamic Book Published, 1996)

ekonomi agar tidak melebihi batas-batas yang wajar dan alamiah. Kondisi semacam itu akan tercipta dalam masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama pada semua orang dalam perjuangan hidup mereka, dan memungkinkan setiap individu untuk menggunakan kemampuan, kepandaian dan keterampilan dengan sebaik-baiknya dalam usaha memenangkan sebuah posisi di masyarakat.

Islam mengambil tindakan pencegahan untuk menjamin dan menjaga kondisi dan kebutuhan manusia agar terjadi distribusi kekayaan yang wajar. Tidak boleh ada pelanggaran, atau pemerkosaan hak-hak individu; tidak boleh ada orang yang diijinkan untuk mengumpulkan kekayaan melebihi batas-batas yang wajar, tidak juga seseorang dibiarkan untuk mati kelaparan, tetapi semuanya diberi imbalan sesuai kemampuan, tanggung jawab dan kebutuhan ekonominya. Dengan kata lain, Islam tidak menganjurkan persamaan yang semu dalam pemilikan dan pencarian kekayaan. Hal itu semata-mata demi keadilan seseorang dalam mendapatkan kekayaan, yang akhirnya dapat memberikan pendidikan dan latihan pada manusia selama mereka menggunakan kebutuhannya secara sah. Islam hanya menginginkan keadilan bagi semua orang dalam mencari kekayaan. Untuk tujuan itu, ia menyediakan pendidikan dan latihan bagi orang-orang dan menerapkan aturan-aturan hukum yang diperlukan. Inilah prinsip keadilan islam agar ketidakmerataan kekayaan yang berlebihan dapat dihapuskan secara permanen.

Suatu lingkungan sosial yang di dalamnya setiap orang menikmati hasil pertumbuhan jelas lebih unggul dibandingkan dengan lingkungan sosial lainnya yang berisi orang-orang yang sebagian menikmati sementara yang lain menjadi korban.⁴⁶ Dengan demikian, kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua manusia tanpa memandang secara diskriminatif antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis (nilai, moral) agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada kesejahteraan materi sajamelainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Memasukkan aspek ruhaniyah ini dalam pandangan Islam tidak akan menimbulkan masalah-masalah matematis, karena sifatnya yang abstrak sebab, yang dioptimalisasikan, sekalipun ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi neo-klasik, bukanlah arus konsumsi akan tetapi “nilai guna” yang berkaitan dengannya, yang ia sendiri adalah kualitas yang tidak berwujud.

⁴⁶ Naqvi, *Etika dan Ilmu, Ibid*, h. 134

Menurut Muhammad Qal'ah Jey dalam buku *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy* “salah satu tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi”.⁴⁷ Tetapi dalam point ini terdapat sebuah pertanyaan besar yaitu, apakah yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi itu pemerataan (*growth with equity*) atau pertumbuhan itu sendiri (*growth*) *an sich*. Jawaban pertanyaan tersebut adalah bahwa Islam membutuhkan kedua aspek tersebut. Baik pertumbuhan (*growth*) maupun pemerataan (*equity*), dibutuhkan secara simultan.

Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Jadi menurut Islam tingkat pertumbuhan yang rendah yang diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata akan lebih baik daripada tingkat pertumbuhan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan distribusi yang merata. Namun demikian, yang lebih baik dari keduanya adalah pertumbuhan yang tinggi tanpa memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah dari manusia dan disertai dengan distribusi pendapatan yang merata.

Jadi Islam tidak akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi, karena memang pertumbuhan (*growth*) sangat dibutuhkan.⁴⁸ Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh,⁴⁹ terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat.

Dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang digambarkan sebelumnya tampak membaik, kita tidak boleh langsung bergembira dan menyatakan bahwa pemulihan ekonomi rakyat Indonesia mulai berhasil. Harus dicatat, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia setinggi langit, misalnya mencapai 20%, dan perkapita mencapai US\$. 3.200, seperti Malaysia. Hal ini belum tentu menggembirakan kita, bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, karena mungkin saja pertumbuhan yang tinggi berada di tangan segelintir konglomerat tertentu.

⁴⁷ Muhammad Qal'ah Jey, *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy*, (Dar An-Nafais, Kuwait), tt. 35.

⁴⁸ Menarik untuk dicermati pendapat Sumitro Djojohadikusumo yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan segi pemerataan pendapatan menjadi dua sayap kembar yang tak terpisahkan dalam satuan gerak pembangunan. Sehingga akan terwujud pula keseimbangan dan efisiensi dalam kegiatan produksi dan keadilan dalam tata masyarakat. (Lihat, Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia : Kini dan Masa Datang*, (LP3ES, cet.v.), h. 147.

⁴⁹ Ada beberapa jenis pertumbuhan dan akibat-akibat negatifnya yang harus dihindarkan, **Pertama**, *Jobless Growth*, yaitu seluruh perekonomian tumbuh, namun tidak memperluas tenagakerja. **Kedua**, *Ruthless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kebanyakan menguntungkan pihak yang kaya, membiarkan jutaan orang tetap terjerembab dalam kemiskinan. **Ketiga** *Viocess Growth*, yaitu pertumbuhann yang tidak memberdayakan masyarakat dan membungkam suara alternatif. **Keempat**, *Rootless growth*, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan hilangnya identitas cultural masyarakat. **Kelima**, *futureless growth*, yaitu pertumbuhan yang di dalamnya generasi muda melakukan pemborosan sumberdaya yang dibutuhkan generasi mendatang. (Richard Posner, *The Essential Holmes*, (Chicago : Chicago University Press, 1992), h. 161.

Menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi melalui indikator PDB Domestik Bruto dan perkapita semata, tidaklah tepat. Dalam paradigma ekonomi Islam pertumbuhan haruslah sejalan dengan keadilan dan pemerataan pendapatan.⁵⁰

Perhitungan perkapita merupakan perhitungan agregat yang belum tentu mencerminkan kondisi riil. Angka rata-rata itu diperoleh berdasarkan pembagian atas Produk Domestik Bruto oleh jumlah penduduk. Sehingga jumlah penduduk sebagai faktor pembagi makin besar, sudah tentu hasil angka perkapita yang diperoleh semakin kecil, demikian pula sebaliknya. Wilayah Jabotabek misalnya, angka pendapatan perkapitanya pasti akan sangat besar, sebab pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah itu. Tetapi bila seluruh penduduk yang mayoritas tinggal di desa disertakan sebagai faktor pembagi tadi, maka perkapita secara nasional menjadi berkurang. Jadi kesimpulannya, PDB dan perkapita tidak dapat menggambarkan kondisi riil. Karena itu, PDB yang tinggi belum cukup menggambarkan perbaikan ekonomi rakyat secara adil. Hal ini karena masih banyak penduduk Indonesia tidak memiliki penghasilan tetap, dan malah dibawah garis kemiskinan, misalnya penduduk Indonesia di kawasan timur dan kawasan-kawasan lainnya sebagai contoh di kawasan pegunungan Cartenz, daerah operasi PT. Freeport Indonesia, kawasan yang tampak makmur, hanyalah Tembaga Pura. Di luar wilayah itu, banyak penduduk yang belum mendapat kesempatan memperoleh penghasilan tetap.

Namun dalam perhitungan PDB perkapita, mereka yang fuqara' dan masakin ini dimasukkan kedalam faktor pembagi, sehingga seolah-olah mereka memperoleh penghasilan tetap mencapai Rp. 6,3 juta pertahun (sekitar Rp. 525.000) perbulan. Mereka seolah-oleh pula menikmati kue pembangunan. Padahal sejatinya, mereka hidup dibawah garis kemiskinan.

Kondisi ini sekaligus menjadikan gambaran yang jelas, betapa kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga negara – negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat.

Hyman Minsky dalam buku *Stabilizing Unstable Economy* (1986) mengatakan, masyarakat kapitalisme itu tidak adil. Suatu fakta menunjukkan bahwa meskipun terjadi

⁵⁰ Keharusan tegaknya keadilan distribusi dalam pertumbuhajn ekonomi telah lama menjadi bahasan dan perhatian para ulama klasik, jauh sebelum ekonom kapitalis membahasnya (Lihat Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *op.cit.*, h. 285). Prioritas keadilan dalam pertumbuhan secara panjang telah dibahas oleh Afzalur Rahman (Lihat, Afzalur Rahman, *Muhammad As A Trader*, London, The Muslim Schools Trust, 1982 trej. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bumi, 1997), h. 119-221., Lihat juga Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Waqaf, (Yogyakarta: 1995), h. 31-35. Lihat juga Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nizaham al-Iqtishad Al-Islami*, (Beirut : Darul ummah, 1990), h. 272

pertumbuhan ekonomi di AS, tetapi kesenjangan masih saja lebar, dan yang miskin semakin miskin.⁵¹

Realita kesenjangan pendapatan, juga terjadi di Indonesia pada masa orde baru. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi dan mendapat pujian dari luar negeri dan lembaga keuangan internasional, namun kemiskinan masih menggurita dan kesenjangan masih menganga. Belajar dari kegagalan pembangunan Indonesia yang pincang itu, maka bangsa Indonesia (khususnya Pemerintah), harus melakukan reorientasi pembangunan dari sistem sentralistik menjadi tersebar. Hal itu perlu ditempuh untuk mencegah terulangnya kegagalan pembangunan nasional selama ini. Maka, penerapan sistem ekonomi daerah, sebenarnya dimaksudkan untuk menjembatani kondisi ekonomi nasional yang cukup timpang itu. Dengan otonomi daerah, diharapkan tercipta makin banyak pusat pertumbuhan, setidaknya ditingkat propinsi. Selama ini dengan pemerintah terpusat, pertumbuhan yang tercipta pun cenderung terpusat. Tidak heran jika pemerintah pusat bertindak seperti *vacum cleaner*, menyedot semua aset yang berada di daerah, termasuk daerah miskin sekalipun.

Sementara Direktur IMF, Christine Lagarde, mengungkapkan bahwa perbaikan kondisi ekonomi saat ini harus menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Menurut Lagarde, terdapat tiga prioritas yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) memperkuat fundamental ekonomi yang tepat ditengah perekonomian dunia yang saling terhubung, (2) mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan tekanan politik, dan (3) menangani permasalahan korupsi dan perubahan iklim yang menjadi kepedulian generasi muda.⁵²

Berdasarkan kondisi ketimpangan internasional dan labilnya pasar, maka negara Islam, organisasi dan lembaga Islam lainnya turut serta secara aktif mencapai tujuan khusus ekonomi pembangunan yaitu *growth with equity*.

Meskipun Islam menekankan keadilan sosio – ekonomi dalam pertumbuhan, hal ini tidak berarti bahwa Islam tidak mementingkan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tuntutan obyektif dan harus dilakukan dengan cepat dan dalam proporsi yang besar. Tanpa pertumbuhan ekonomi, keadilan memang dapat dirasakan, tetapi masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, karena proporsi kue ekonomi yang dibagikan masih kurang cukup.

⁵¹ Hyman Minsky dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Economic Challenge*, terjemahan, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1999), h. 139 – 141.

⁵² Manual Meeting, Pertemuan Tahunan *World Bank Group* dan *the International Monetary Fund (IMF)*. Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur Bank Dunia dan IMF 2017 berlangsung di Washington DC, Amerika Serikat, pada 9–15 Oktober 2017.

Dalam rangka pencapaian keadilan sosio – ekonomi yang dapat membahagiakan itulah realisasi pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan. Tetapi tetap tak bisa terlepas dari sistem distribusi kue ekonomi yang berdimensi keadilan, baik untuk jangka sekarang maupun mendatang.

Bagaimana pun Islam tidak mendukung ketidakmerataan, juga tidak mengajarkan pemerataan kekayaan, tetapi ia mengakui adanya suatu tingkatan ekonomi yang alamiah dalam masyarakat tanpa mengkonsentrasikan pada beberapa tempat tertentu. Islam juga tidak akan menyetujui perbedaan kekayaan yang tidak adil diantara berbagai kalangan masyarakat atau peraturan-peraturan yang dibuat-buat untuk mengubah perbedaan alamiah dalam masyarakat. Pendidikan moral akan memberikan pertolongan dalam mempertahankan perbedaan kekayaan dalam batas-batas yang wajar, sedangkan aturan-aturan hukumnya akan membantu menyebarkan kekayaan keseluruhan anggota masyarakat.

Nabi Saw mengemukakan tentang kebutuhan hidup yang paling pokok dalam perkataan berikut ini: “seorang anak manusia tidak mempunyai hak yang lebih baik daripada jika ia mempunyai sebuah rumah dimana ia dapat hidup, sepotong kain dimana ia dapat menyembunyikan ketelanjangannya, serta sepotong roti dan air”(Tirmizi). Ibn Hizam menjelaskan kebutuhan dasar individu sebagai berikut: “Ia harus mempunyai makanan yang cukup untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan kuat. Ia harus mempunyai pakaian yang pantas dan cocok untuk musim dingin dan panas. ia harus mempunyai tempat tinggal yang memadai untuk melindungi dirinya dari cuaca dan memberinya keleluasan pribadi”. Al-Qur’an juga menegaskan bahwa meskipun terdapat ketidakmerataan kekayaan dalam masyarakat, tidak boleh ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sebab semuanya mempunyai hak hidup yang sama.

Diriwayatkan oleh Umar dalam tahun-tahun terakhir kekhalifahannya berkata “sesuatu yang saya ketahui hari ini, jika telah saya ketahui sebelumnya, saya tidak akan pernah menundanya lagi dan tidak pula ragu-ragu untuk menyalurkan kelebihan kekayaan pada kaum Muhajirin yang miskin.” Diriwayatkan juga bahwa Ali berkata, “Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang miskin sampai kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jika mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian atau terlibat dalam kesulitan keuangan lainnya, maka hal itu semata-mata disebabkan orang-orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya.

Oleh karenanya, Allah akan bertanya pada mereka pada Hari Pengadilan dan akan menyiksa mereka.”⁵³

Setelah mengutip al-Quran dan hadits Nabi, Ibn Hazm berkata, ”Adalah kewajiban orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin dan yang membutuhkannya di desa tau di kota mereka. Dan jika harta karunnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka negara berhak mengambil kelebihan kekayaan mereka. Selanjutnya, ia berkata bahwa seluruh sahabat Nabi sepakat terhadap hal ini, yaitu jika ada seseorang yang lapar atau tidak mempunyai pakaian atau tempat tinggal, maka negara berkewajiban memberikan kebutuhan-kebutuhannya yang diperoleh dari kelebihan orang-orang kaya.”⁵⁴

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. *Pertama*, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud *full employment*. *Kedua*, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. *Ketiga*, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan lainnya. *Keempat*, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. *Kelima*, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak.

Dengan upaya-upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur’an dengan tegas mengatakan, “kekayaan hendaknya tidak terus menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja”. (QS. 59 : 7).

Selanjutnya menurut Umer Chapra ada lima tindakan kebijakan pembangunan ekonomi (*economic development*) yang disertai dengan keadilan dan stabilitas, yaitu :

1. Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
2. Mereduksi konsentrasi kekayaan
3. Melakukan restrukturisasi ekonomi
4. Melakukan restrukturisasi keuangan, dan
5. Rencana kebijakan strategis⁵⁵

Manusia merupakan elemen pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, tidak mungkin akan berhasil

⁵³ Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader), (Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumi), h. 88-91

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ M. Umer Cahpra, *Islam and Economic Development, op.cit*, h. 84.

mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. Karena itu, tugas yang paling menantang di depan setiap negara muslim adalah memotivasi faktor manusia untuk melakukan aktivitas konstruktif bagi pembangunan yang berkeadilan. Setiap individu harus memberikan apa yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien yang disertai integritas, kejujuran, disiplin dan siap berkorban untuk mengatasi hambatan dalam perjalanan pembangunan.

M. A. Mannan menilai bahwa konsep pembangunan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan konsep modern tentang pembangunan. Keunggulan tersebut terletak pada motivasi pembangunan ekonomi dalam Islam, tidak hanya timbul dari masalah ekonomi manusia semata-mata tetapi juga dari tujuan ilahi yang tertera dalam Al-quran dan Hadits.⁵⁶

Memang harus diakui bahwa pertumbuhan perkapita sangat tergantung kepada sumberdaya alam. Namun sumberdaya alam saja bukan syarat yang cukup untuk pembangunan ekonomi. Masih dibutuhkan satu syarat lain yang utama yaitu perilaku manusia. Perilaku ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu harus ada upaya menempa perilaku manusia tersebut ke arah yang mendukung pembangunan.

Kesimpulan

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi material saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang terkait erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya diukur dari aspek ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia sekaligus.

Kajian tentang pertumbuhan (*growth*) ekonomi dan pemerataan dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terkebelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan perencanaan pembangunannya. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam

⁵⁶ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 1997), h. 393-394.

ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.

Daftar Referensi

- Abdullah Abdul Husein At-Tariqy, *Al-Iqtishad Al-Islami, Ushuluhi wa Mubaun wa Ahdaf*, Dar An-Nafais, Kuwait, 1999
- Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam*, Malaysia: International Islamic University Press, 1987
- Ace Pce Pertadireja, *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta, BPFE, 1984
- Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*. Terj. Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1995.
- _____, *Muhammad As A Trader*, London, The Muslim Schools Trust, 1982 terj. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, Jakarta, Yayasan Swarna Bumi, 1997
- Al-Quran dan Terjemahan
- Anwar Ibrahim, *The Asia Renaissance*, terj Ihsan Ali fauzi, Renaisans Asia, Bandung: Mizan, 1998
- Badan Pusat Statistik, 2020.
- Carl Lidholm dan Donald Mead, *Small Scale Enterprise : A Profile*, diproduksi kembali dari Small Scale Industries in Developing Countries : Empirical Evidence and Policy Implication, (Michigan State University Development Paper, dalam *Economic Impact*, 2, 1998
- David Birch, *The Job Generation, Process* (Cambridge, Mass : MIT Program on Neighbourhood and Regional Change, 1979.
- De Carvalho Fernando Cardim, “*Keynes and the reform of the capitalist social order*”. Journal of Post Keynesian Economics/Winter, Vol. 31, No. 2, (2008)
- Ervin Laszlo, *Millenium Ketiga, Tantangan dan Visi* (terj.3Rd Millenium The Challenge and Vision, Jakarta, Dinastindo, Adiperkasa Internasional, 1999
- Fritjof Capra, *Titik balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Budaya*, ter. (*The Turning Point, Science, Society, and The Rising Culture*), cet.3 Yogyakarta: Yayasan Betang Budaya, 1999
- George Soule, *Idea of the Great Economist*, terj, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Jakarta: Kanisius, 1994
- Grahan Gudgin, *Industrial Location Process and Employment Growth*, London : Gower, 1997
- Harian.analisadaily.com/mobile/opini/news/kesenjangan pendapatan per kapita Indonesia. Terbitan 18 Maret 2018.
- Hasan Al-Banna, *Majmu'at at-Rasail*, Alexandria: Darud Dakwah, 1989
- Hyman Minsky dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Economic Challenge*, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, terjemahan 1999
- <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/7-faktor-pendorong-turunnya-kemiskinan-di-indonesia-versi-bps/1531931>
- <http://www.freelists.org>
- Ian Litte, Tibor Scietovsky dan Maurice Scott, *Industri and Trade in Some Developing Countries*, London, Oxford University Press, 1970
- Ibrahim yusuf, *Istiratijiyatu wa Tiknik al-Tanmiyah al-Iqtisodiyah fi al-Islam*, Kairo: al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah, 1981
- Kosim Abu, Taufiq, “*Ekonomi Biaya Tinggi, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume. 7, No. 2, Desember 2009.

- Kursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam*, dalam Etika Ekonomi Politik, (Risalah Gusti, Jakarta, 1977)
- M. Umer Chapra, dkk. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- _____, *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Throught, (IIIT), USA, 1992. Edisi Indonesia, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Risalah Gusti, Jakarta, 1999
- _____, *Islam and Economic Development*, USA, The Internasional Institute of Islamic Though (IIIT), 1992
- M.Abdul Mannan, *Islamic Economiys, Theory and Practice*, terj. M.Nastangin, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta, Dana Bakti Waqaf, 1997
- Malik bin Nabi, *al-Muslim fi 'Alam al-Iqtishod*, Beirut: Dar al-Syuruq, 1974
- Mark Skousen, *Economics on Trials : Lies, Myths, and Realities*, USA: Bussiness One Irwin, 1991
- Michael P.Todaro, *Economic Development in The Third World*, New York, London, Longman 1989
- Muhammad M.Akram Khan, *Economic Message of Quran*, Kuwait: Islamic Book Published, 1996
- Muhammad Qal'ah Jey , *Mabahits fi Al-Iqtishad al-Islamy*, Dar An-Nafais, Kuwait
- Muhammad Yunus, *The Poor as the Engine of Development*, dalam Economic Impact, 2, 1988
- Richard Posner, *The Essential Holmes*, Chicago : Chicago University Press, 1992
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi II, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999
- Sumitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia : Kini dan Masa Datang*, LP3ES, cet.v. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Obor Indonesia, 1991
- Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nizaham al-Iqtishad Al-Islami*, Darul ummah Beirut, 1990